

ABSTRAK

PENGUNAAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Oleh

Atikah Yuhana Putri

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta berkewajiban merahasiakan isi akta sesuai pada sumpah jabatan dan undang-undang jabatan notaris. Kewajiban merahasiakan akta menimbulkan konsekuensi berupa hak ingkar. Pada kenyataannya, notaris sering terlibat dalam permasalahan hukum dan dipanggil sebagai saksi atau tersangka di persidangan. Permasalahan yang akan dibahas adalah penggunaan hak ingkar notaris pada proses peradilan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan faktor penghambat penggunaan hak ingkar notaris.

Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah penelitian yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data dilaksanakan secara studi pustaka dan wawancara. Metode pengolahan data yaitu pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematis data. Data tersebut dianalisis dengan kualitatif.

Hasil dan pembahasan menunjukkan penggunaan hak ingkar notaris bersifat relatif, dilihat dari kepentingan mana yang lebih penting serta hanya dapat digunakan sepanjang tidak ada ketentuan lain yang menggugurkan kewajiban merahasiakan akta, seperti ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hak ingkar juga tidak dapat digunakan apabila notaris berkedudukan sebagai terdakwa. Faktor yang menjadi penghambat antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam memahami tugas jabatan notaris dan kurangnya pemahaman dalam diri notaris dalam memahami batasan kerahasiaan akta.

Kata kunci: *Hak Ingkar, Notaris, Penggunaan.*

ABSTRACT

THE USE OF A NOTARY'S RIGHT OF REJECTION IN JUDICIAL PROCEEDINGS BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 30 OF 2004 CONCERNING THE OFFICE OF A NOTARY PUBLIC

By

Atikah Yuhana Putri

A notary is a public official authorized to draw up authentic deeds and obliged to maintain confidentiality of the contents of the deed in accordance with the oath of office and the notary law. This obligation to maintain confidentiality entails consequences in the form of the right of recusal. In reality, notaries are often involved in legal matters and are summoned as witnesses or suspects in court. The issues to be discussed are the use of the notary's right of recusal in the judicial process based on the Notary Law and the factors inhibiting the use of the notary's right of recusal.

The type of research used is normative legal research with a descriptive legal research approach. The research problem is approached using a statute approach. The data sources are secondary data. Data collection methods are literature studies and interviews. Data processing methods include examining, marking, reconstructing, and systematically analyzing the data. The data is analyzed qualitatively.

The results and discussion indicate that the use of a notary's right of recusal is relative, determined by the more important interest and can only be exercised if there are no other provisions that waive the obligation to maintain confidentiality of the deed, such as Article 36 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption and Article 59 of Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court. The right of recusal also cannot be exercised if the notary is a defendant. Impediments include a lack of understanding among law enforcement officials of the duties of a notary and a lack of understanding within the notary regarding the limits of deed confidentiality.

Keywords: Right of Refusal, Notary, Use